

DINAMIKA KOLABORASI KOMUNITAS PEDULI LINGKUNGAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN MALANG

Muhamad Imron^{1*}, Dafis Ubaidillah Assiddiq^{2*}, Andini Dwi Kusuma^{3*}, Diky Yuliaji Prasetyo^{4*}

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

dafiez.assiddiq@gmail.com

ABSTRACT

The level of resilience to disasters in the beach tourism area of Clungup, Malang district is now a challenge for local stakeholders. There are at least two types of disasters currently threatening the coastal line ecosystem, the first is a natural disaster and the second is a human disaster. The coastline consists of coastal forests, mangrove forests, seagrass beds, and coral reefs. From the coastal direction this resistance is tested by the swift waves of the southern coast of Java Island and from the mainland this resistance is tested by deforestation and fishing using potash and fish bombs. The involvement of actors or elements deserves attention because the sustainability of the ecosystem around the coast currently depends on what they are doing. This study aims to identify and describe the role of actors and collaborative practices in the educational tourism coastal area of Clungup Mangrove Conservation. This research was conducted using a qualitative descriptive method, data collection was carried out by observation, interviews and document study. The result of this research shows that the role played by the community that cares about the environment is not directly proportional to the role of other actors (local government). Environmental activists have made massive efforts to restructure the coastal ecosystem resilience scheme from natural and human-induced disasters.

Keywords: *Role of actors, Collaboration, Ecosystem sustainability*

ABTRAK

Tingkat ketahanan terhadap bencana di kawasan wisata pantai Clungup kabupaten Malang kini menjadi tantangan bagi stakeholder lokal. Setidaknya terdapat dua jenis bencana yang saat ini mengancam ekosistem barisan pantai tersebut, yang pertama natural disaster dan yang kedua human disaster. Barisan pantai terdiri dari hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dari arah pantai ketahanan itu diuji oleh derasnya ombak pantai selatan pulau Jawa dan dari daratan ketahanan itu diuji oleh penggundulan hutan dan penangkapan ikan dengan menggunakan potas dan bom ikan. Keterlibatan aktor atau elemen patut memperoleh perhatian karena keberlangsungan ekosistem sekitar pantai saat ini bergantung pada apa yang diperbuat oleh mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran aktor dan praktik kolaborasi yang ada di kawasan pantai wisata edukasi Clungup Mangrove Conservation. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh komunitas peduli lingkungan tidak berbanding lurus dengan peran dari aktor lainnya (pemerintah daerah). Para pegiat lingkungan telah berupaya cukup massif dalam menata ulang skema ketahanan ekosistem pantai dari serangan bencana yang ditimbulkan oleh alam dan manusia.

Kata kunci: Peran aktor, Kolaborasi, Keberlangsungan ekosistem

PENDAHULUAN

Kawasan pantai selatan pulau Jawa khususnya di Malang tengah menghadapi tantangan besar berupa ketahanan terhadap bencana. Ketahanan terhadap bencana layak menjadi prioritas pada setiap agenda pengembangan kawasan sekitar pantai. Pengembangan kawasan pantai untuk areal wisata ataupun areal konservasi idealnya harus memperhatikan secara serius mengenai bagaimana sistem ketahanan bencana itu di bangun dan dijaga oleh seluruh unsur yang terlibat di dalamnya. Komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat merupakan salah satu kunci terjaganya kelestarian ekosistem disekitar pantai.

Tingkat ketahanan terhadap bencana di kawasan wisata pantai Clungup kabupaten Malang kini menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder lokal. Setidaknya terdapat dua jenis bencana yang saat ini mengancam ekosistem barisan pantai tersebut, yang pertama natural disaster dan yang kedua human disaster. Barisan pantai terdiri dari hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dari arah pantai ketahanan itu diuji oleh derasnya ombak pantai selatan pulau Jawa dan dari daratan ketahanan itu diuji oleh penggundulan hutan dan penangkapan ikan dengan menggunakan potas dan bom ikan Sebagai salah satu pantai di kabupaten

Malang, kawasan pantai Clungup memiliki sejarah keseimbangan ekosistem yang cukup baik sebelum berbagai kerusakan terjadi di areal ini. Kawasan ini memiliki barisan pantai yang terdiri dari hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Awal mula kerusakan terjadi atas ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi pembalakan hutan disekitar kawasan pantai hingga menyebabkan gundulnya hutan. Selain itu kerusakan juga terjadi di perairan pantai berupa rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya akibat penggunaan bom ikan, potas dan berbagai alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Kesalahan dalam bersikap terhadap alam sekitar pantai ini setidaknya telah mengakibatkan dua dari empat barisan pantai tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan alam ini dapat kita kategorikan ke dalam *human disaster* atau kerusakan (bencana) yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Prasetya (2010). Padahal disisi lain, kawasan pantai Clungup ini sesungguhnya juga tengah memperoleh ancaman kerusakan sebagai akibat dari arus ombak pantai selatan yang terkenal besar. Derasnya ombak pantai selatan pulau Jawa seringkali berdampak pada rusaknya padang lamun dan hutan mangrove di tepi pantai. Dan ini dapat kita kategorikan pada

natural disaster atau kerusakan (bencana) yang disebabkan oleh alam.

Dua tantangan sekaligus tengah dialami oleh ekosistem pantai. *Human disaster* dan *natural disaster* menguji secara bersamaan ketahanan lingkungan kawasan pantai Clungup. Hingga pada tahun 2012, inisiasi dari warga setempat mulai muncul untuk melakukan penyikapan atas kerusakan alam yang telah berlangsung sejak tahun 1990 an. Awal mula bentuk penyikapan yang diambil berupa melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang telah rusak. Aksi ini awalnya dilakukan oleh beberapa warga yang tinggal di desa Tambakrejo, desa dimana pantai Clungup berada.

Inisiasi untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi lingkungan oleh warga ini berangkat dari cita-cita ingin mengembalikan keindahan kawasan pantai Clungup yang telah lama tidak dapat mereka nikmati. Pantai Clungup memiliki keindahan yang luar biasa, ia menyimpan potensi yang cukup besar bila kelestarian alamnya terjaga dengan baik. Dengan berbekal sumberdaya seadanya, beberapa warga kemudian membentuk satu komunitas peduli lingkungan bernama Lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya Clungup Mangrove Conservation (CMC). Komunitas peduli lingkungan ini secara

bertahap telah memulai merehabilitasi hutan mangrove yang ada disekitar pantai.

Minimnya keterlibatan warga membuat komunitas ini mengalami permasalahan dalam menjalankan berbagai kegiatan rehabilitasi dan konservasi. Sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas, inisiatif yang muncul adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah. Hal ini dilakukan mengingat pengembangan lingkungan pada level rehabilitasi dan konservasi adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia membutuhkan lingkaran kerjasama (kolaborasi) antar stakeholder yang memiliki komitmen kuat dalam setiap upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan pantai. Keberhasilan suatu kolaborasi ditentukan oleh *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among the Participants, Governance, Acces to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Acces to Resources*. (Goldsmith dan Donald, 2009: 135-136). Saat ke delapan unsur tersebut terpenuhi, maka kolaborasi yang berlangsung dapat disebut telah berjalan ideal. Peran menjaga keseimbangan ekosistem pantai yang dimainkan oleh komunitas peduli lingkungan ini masih membutuhkan banyak dorongan dari pihak eksternal lainnya. Kompleksitas persoalan

mewajibkan adanya kolaborasi yang positif antar pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis praktik kolaborasi yang berlangsung antar elemen yang ada. Peneliti melakukan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian berada di desa Tambakrejo, kecamatan Sumbermanjing Wetan, kabupaten Malang. Adapun sumber data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para informan kunci dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dari literatur buku dan jurnal. Pengumpulan data melalui indept interview, observasi langsung dan telaah dokumen. Validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber. Moleong (2011:331). Penelitian ini fokus pada bagaimana peran komunitas peduli lingkungan dan pemerintah daerah yang ada di kawasan pantai wisata edukasi Clungup Mangrove Conservation dan bagaimana kolaborasi yang terbangun antar kedua elemen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Malang

Gambar Peta Lokasi Kab. Malang



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Malang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten banyuwangi. Selain itu, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kapanjen.

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sebagian wilayahnya merupakan areal pegunungan yang hingga saat ini tergolong sejuk, dan karena keindahan alamnya, daerah ini menjadi salah satu tujuan utama wisata di Jawa Timur.

Batas Wilayah Kabupaten Malang

Batas Barat	Kab. Jombang , Kota Batu
Batas Timur	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
Batas Utara	Kab. Kediri, Kab. Blitar
Batas Selatan	Samudra Hindia

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang daerah selatan langsung berbatasan dengan samudra hindia yang mempunyai garis pantai yang panjang meskipun beberapa garis pantai juga banyak tebing tebing pegunungan . garis pantai di kabupaten malang banyak kita temukan di kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Salah satu kecamatan yang memiliki banyak destinasi wisata alam adalah kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kecamatan ini ada di Kabupaten Malang dan berjarak 30 km dari ibu kota kabupaten (Kepanjen). Adapun pusat pemerintahan ada di desa Argotirto, namun pusat perekonomian berada di desa Sumbermanjing wetan. Sedangkan topografinya sebagian besar berupa dataran tinggi perbukitan dengan ketinggian antara 0-650 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan, kecamatan ini merupakan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Kecamatan ini terkenal memiliki banyak potensi wisata alam yang luar biasa indah, diantaranya pantai Tamban, pantai sempu, pantai Sendangbiru. Di pulau Sempu terdapat segoro Anakan yang telah cukup terkenal eksotisme keindahannya. Adapun pantai di kecamatan ini terdiri dari

pantai Sendang biru, pantai Sempu, pantai goa Cina, pantai Tamban, pantai Sendiki, pantai Watu Leter, pantai tiga warna, pantai Teluk Asmara, pantai Gatra, dan Pantai Clungup.

Dengan begitu banyak pantai yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan maka potensi Wisata sangat besar, namun Potensi untuk Bencana juga tidak boleh lepas dari perhatian kita, karena langsung berbatasan dengan Samudra hindia yang sangat punya potensi besar dengan beberapa bencana alam karena adanya Lempeng Tektonik Raksasa Samudra Hindia. Adapun potensi bencana pada pantai adalah ; Tsunami, Rob, dan Gempa.

Peran Clungup Mangrove Conservation (CMC)

Lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya Clungup Mangrove Conservation (CMC) telah memulai aktivitas konservasi sejak tahun 2012. Komunitas peduli lingkungan ini secara bertahap telah memulai merehabilitasi hutan mangrove yang ada disekitar pantai Clungup yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab (*human disaster*) dan akibat derasnya arus ombak yang sering menghantam pesisir pantai selatan (*natural disaster*). Adapun peran yang dilakukan oleh komunitas ini

adalah sebagai berikut:

1. Secara massif mempromosikan wisata ini pada media sosial baik itu facebook maupun instagram. Saat ini, mempromosikan suatu produk dengan media sosial secara tepat dapat mempercepat penyebaran informasi, dan komunitas peduli lingkungan ini telah berhasil membuktikannya.
2. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Malang. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat promosi dan pengembangan wisata tersebut.
3. Komunitas ini memberikan layanan wisata edukasi bagi masyarakat ataupun anak usia sekolah yang membutuhkan wisata bernuansa edukatif seperti praktik penanaman mangrove, cara perawatan hingga cara menjaga agar mangrove tidak mengalami kerusakan.
4. Menjaga fasilitas wisata yang ada di areal pantai Clungup. Komunitas ini selain menjaga fasilitas yang ada juga selalu menanamkan ke para wisatawan agar mempunyai rasa memiliki terhadap segala fasilitas yang ada termasuk ekosistem yang terdapat di lokasi wisata.

Peran Pemerintah Daerah

Adapun peran yang telah dilakukan

oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Malang sampai saat ini masih berupa fasilitasi keikutsertaan dalam beberapa even perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dlevel yang lebih tinggi seperti pemerintah provinsi. Clungup Mangrove Conservation (CMC) pada tahun 2017 yang lalu berhasil meraih penghargaan sebagai wisata alam terbaik di Jawa Timur. Saat itu, pemerintah daerah Kabupaten Malang memang mendaftarkan CMC dalam gelaran even yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Dengan berhasilnya CMC meraih penghargaan tersebut kemudian berimbas pada semakin ramainya lokasi wisata serta semakin membuka mata pemerintah daerah tentang pentingnya memperhatikan dan mengembangkan berbagai potensi wisata di daerahnya.

Peran pemerintah menurut Kwak (2009) terdiri dari 5 aturan utama yang harus dilakukan oleh mereka, yakni sebagai berikut:

1. Menyiapkan lingkungan investasi yang menguntungkan bagi banyak pihak
2. Menyediakan perangkat kebijakan/aturan yang memadai
3. Merumuskan desain kordinasi yang ideal bagi kemitraan
4. Menentukan pemegang ijin
5. Adanya keterlibatan secara aktif dalam

setiap perkembangan proyek Peran paling menonjol yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yakni pengeluaran ijin bagi pengelola wisata untuk mengembangkan berbagai potensi wisata alam yang ada di areal pantai Clungup, adapun 4 peran lainnya, menurut pengelola wisata, belum terlihat signifikan. Desain kordinasi dan kewenangan yang ideal bagi kemitraan misalnya hingga kini juga belum tampak dilakukan. Bahkan pada level keterlibatan secara aktif dalam detail upaya perkembangan proyek rehabilitasi mangrove juga terlihat belum nyata dan kongkrit, karena hingga saat ini keberlangsungan rehabilitasi masih di gawangi oleh para aktivis lingkungan setempat.

Dinamika Kolaborasi

Kolaborasi yang terjalin antar stakeholder di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) mengalami dinamika kolaborasi (*collaborative dynamics*) yang pasang surut. Ada saatnya kolaborasi yang terjalin antara lembaga masyarakat konservasi bakti alam dengan pemerintah tampak begitu baik dengan bukti di daftarkannya CMC ini dalam perlombaan tingkat provinsi oleh pemerintah daerah kabupaten Malang, namun saat tertentu masyarakat juga beranggapan bahwa relasi ataupun kolaborasi hanya terjadi saat ada

event tertentu saja juga kurang begitu signifikan. Pasalnya, hal yang lebih strategis sesungguhnya adalah pola relasi dan kolaborasi dalam berbagai proses pengelolaan wisata alam dari hulu sampai ke hilir, artinya kolaborasi yang ideal tidak sekedar saat momentum perlombaan ataupun festival saja. Kolaborasi menyangkut hal-hal yang strategis seperti pemberdayaan masyarakat setempat baik dalam ranah pengembangan lokasi wisata, potensi ekonomi baru yang dapat digali hingga pada level bagaimana kawasan wisata ini dapat menjadi wahana edukasi bagi warga kabupaten Malang.

Secara teoritis, terdapat tiga komponen yang saling berkaitan dalam dinamika kolaboratif (*collaborative dynamics*), diantaranya (Balogh, 2011):

- 1) *Principled Engagement*, pihak-pihak yang tergabung dengan konten, relasi dan tujuan yang berbeda dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan, meredam konflik hingga menciptakan suatu nilai. Principle engagement dapat muncul dari interaksi yang terjalin secara berulang-ulang dari keempat elemen berikut:
 - a) *Discovery*, berfokus seputar persoalan, identifikasi nilai dan kepentingan bersama.
 - b) *Definition*, dicirikan melalui keberlanjutan usaha guna memperjelas maksud dan

- tujuan, penyetujuan terhadap konsep yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, serta mengklarifikasi kembali hak dan kewajiban masing-masing partisipan.
- c) *Deliberation*, berupa mempertimbangkan perspektif yang muncul dari berbagai pihak dan berorientasi pada kepentingan publik.
- d) *Determination*, bahwa setiap perumusan kebijakan harus menggabungkan dua proses yakni keputusan prosedural dan ketentuan substantif.
- 2) *Shared Motivation*, menekankan pada modal sosial yang dimiliki oleh setiap elemen yang ada. *Shared motivation* ini terdiri dari empat elemen:
- a) *Mutual Trust*, berupa munculnya rasa saling percaya akibat seringkali melakukan kerjasama antar elemen yang ada.
- b) *Mutual Understanding*, berupa kemauan dan kemampuan untuk memahami serta menghormati posisi dan kepentingan satu sama lain.
- c) *Internal Legitimacy*, berupa rasa saling memahami dan menghormati peranan dari masing-masing stakeholder pada gilirannya akan menghasilkan rasa percaya.
- d) *Shared Commitment*, dengan mengesampingkan sekat-sekat atau batasan yang mungkin muncul saat proses relasi sedang terbangun, semisal batasan organisasional, sektoral dan lain sebagainya. Yang selalu diupayakan dari setiap stakeholder adalah komitmen untuk saling berbagi.
- 3) *Capacity for join action*, yakni dengan terjalannya kolaborasi yang baik dalam melaksanakan suatu keputusan atau agenda yang disepakati, maka niscaya dapat meningkatkan kapasitas kedua belah pihak. Hal ini meliputi:
- a) *Procedural/institutional arrangements*, dapat berupa panduan yang tersusun rapi terkait proses dan struktur organisasi yang telah disepakati. Ini menjadi penting demi terciptanya suatu sistem yang baik dalam pengelolaan setiap agenda.
- b) *Leadership*, setiap aksi kolaborasi nyatanya memerlukan peran kepemimpinan sehingga sistem yang telah ada dapat berjalan sesuai dengan ketentuan kerangka kesepakatan.

- c) *Knowledge*, pengetahuan, semangat dan etos kerja serta modal sosial yang di satu padukan dengan nilai-nilai dari seluruh pihak yang terkait.
- d) *Resources*, setiap kolaborasi pasti akan menguntungkan berbagai pihak terutama dalam hal sumberdaya karena memungkinkan adanya saling berbagi energi dan memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki. Sumberdaya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, fisik ataupun finansial.

Dari tiga komponen yang saling berkaitan dalam *collaborative dynamics* diatas maka dinamika kolaborasi yang berlangsung dapat diringkas sebagai berikut:

Komponen Principled Engagemen t	Pemerintah Pemerintah Daerah	Komunitas Komunitas Peduli Lingkungan
<i>Discovery</i>	Pemerintah Daerah menegaskan perlu adanya kepentingan bersama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta terjaganya ekosistem yang ada.	Menggali nilai-nilai khasanah budaya jawa untuk menyatukan energi dari seluruh stakeholder. Pemahaman bersama bahwa harus terjalin relasi harmoni antara alam dan manusia secara terus-menerus mereka

		kampanyekan ke seluruh pihak terkait.
<i>Definition</i>	Pemerintah Daerah lebih bersifat pasif	Elemen ini (keberlanjutan usaha guna memperjelas maksud dan tujuan program) lebih banyak dilakukan oleh komunitas peduli lingkungan.
<i>Deliberation</i>	Memilih mendelegasi hampir sepenuhnya kepada pengelola wisata untuk mengemban gkan berbagai potensi yang ada.	mempertimbang kan beragam perspektif yang muncul dari berbagai pihak baik itu masyarakat lokal, pemerintah daerah dan berorientasi pada kepentingan publik.
<i>Determination</i>	Idealnya, setiap perumusan kebijakan harus menggabungkan dua proses yakni keputusan prosedural dan ketentuan substantif, namun yang ketentuan substantif berupa upaya-upaya riil untuk penyelamatan ekosistem pantai tidak terlalu nyata dilakukan.	.Komunitas peduli lingkungan sering memberlakukan sikap prosedural dalam mengambil keputusan namun seringkali menemukan sikap kurang responsif dari para pembuat kebijakan (<i>decision maker</i>)

Komponen Shared Motivation	Pemerintah Daerah	Komunitas Peduli Lingkungan
<i>Mutual Trust</i>	Kurang terlihat rasa saling	Kurang terlihat rasa saling

Dinamika Kolaborasi Komunitas Peduli Lingkungan Dan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Hutan Mangrove Di Kabupaten Malang

	percaya sebagai akibat minimnya kerjasama yang melibatkan antar elemen yang ada.	percaya sebagai akibat minimnya kerjasama yang melibatkan antar elemen yang ada.
<i>Mutual Understanding</i>	Cenderung kurang memiliki kemauan untuk memahami serta menghormati posisi dan kepentingan komunitas	Cenderung memiliki kemauan dan kemampuan untuk memahami serta menghormati posisi dan kepentingan pemerintah daerah.
<i>Internal Legitimacy</i>	memahami dan menghormati peranan dari masing-masing stakeholder meski sikap pasif lebih sering terlihat.	memahami dan menghormati peranan dari masing-masing stakeholder.
<i>Shared Commitment</i>	Komitmen untuk saling berbagi masih bersifat insidental	Komitmen untuk saling berbagi sangat tinggi

	even wisata tertentu	nilai-nilai dari seluruh pihak yang terkait.
<i>Resources</i>	Share sumberdaya finansial dan jaringan saat terdapat even tertentu	Cenderung saling berbagi energi dan memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki

Pada komponen pertama *principle engagement*, yaitu identifikasi nilai dan kepentingan bersama telah cukup berhasil dilakukan oleh para pegiat lingkungan atau komunitas CMC. Mereka menggali nilai-nilai khasanah budaya jawa untuk menyatukan energi dari seluruh stakeholder yang ada baik pihak swasta ataupun pemerintah. Pemahaman bersama bahwa harus terjalin relasi harmoni antara alam dan manusia secara terus-menerus mereka kampanyekan ke seluruh pihak terkait. Kolaborasi yang terjalin antara pengelola wisata dengan pemerintah daerah juga telah merujuk pada kepentingan bersama yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta terjaganya ekosistem yang ada. Pada elemen deliberation dan determination, pemerintah daerah lebih cenderung memberi kewenangan pada pengelola wisata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, namun pada saat yang sama pemerintah daerah juga tidak begitu hadir untuk memberikan support riil pada komunitas. Mendelegasikan kewenangan

Komponen Capacity for joint action	Pemerintah Daerah	Komunitas Peduli Lingkungan
<i>Procedural/institutional arrangements</i>	Belum terbangun sistem prosedur kepariwisataan yang baik dilevel daerah	Telah terdapat panduan yang tersusun rapi terkait proses layanan wisata dan struktur organisasi (pengelola wisata)
<i>Leadership</i>	Pola kepemimpinan berlangsung prosedural dan cenderung berjarak.	kepemimpinan berada di tangan ketua komunitas dan berlangsung dengan perpaduan nilai kultural dan struktural.
<i>Knowledge</i>	Share pengetahuan bersifat terbatas dan hanya saat terdapat	pengetahuan, semangat dan etos kerja serta modal sosial yang di satu padukan dengan

adalah hal yang baik, namun tidak memberikan pendampingan juga menjadi hal yang kurang mengingat pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Melalui dinas pariwisata seharusnya suatu kebijakan tertentu untuk mendukung keberlanjutan ekosistem pantai dapat di implementasikan.

Komponen *shared motivation* sesungguhnya menekankan pada modal sosial yang dimiliki oleh setiap elemen yang ada harus menjadi sarana penunjang kolaborasi yang ideal. Saling percaya antar elemen menjadi kunci utama untuk membangun kolaborasi yang sehat. Namun pada kenyataannya, masyarakat ataupun komunitas peduli lingkungan terlihat kurang begitu percaya dengan pihak pemerintah daerah dikarenakan seringnya ketidakhadiran pemerintah dalam proses-proses pengembangan wisata. Bagi komunitas dan masyarakat setempat, fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa mengikuti clungup mangrove conservation ke ajang perlombaaan saja tentu tidaklah cukup. Kehadiran pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia setempat secara lebih kongkrit menjadi kebutuhan yang lebih signifikan. Apalagi menurut pengakuan pengelola areal wisata,

paska menjuarai even yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, piala yang sejatinya menjadi hak warga setempat berada di kantor pemerintah daerah. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi antar elemen tidaklah *clear* sejak awal.

Saat kolaborasi telah berjalan dengan baik diharapkan kapasitas kedua belah pihak akan semakin meningkat. Masyarakat ataupun komunitas peduli lingkungan akan semakin terberdayakan oleh beragam kebijakan yang dihadirkan pemerintah, dan pada saat yang sama pula pemerintah juga semakin mudah dalam mengembangkan potensi daerahnya karena terbantu oleh komunitas-komunitas yang secara pro aktif melakukan kerja-kerja positif untuk lingkungannya. Melalui komponen *capacity for join action* ini idealnya terdapat saling tukar pengetahuan dan sumber daya antar elemen yang terlibat dalam kolaborasi. Namun kenyataannya, ditemukan *share* pengetahuan yang bersifat terbatas dan hanya saat terdapat even wisata tertentu. Sedangkan pada elemen lainnya, tukar pengetahuan berjalan dengan cukup baik dan cenderung saling berbagi energi dan memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki. Tata kelola kolaboratif perlu di implementasikan secara komprehensif pada program wisata edukasi ini.

Collaborative governance meniscayakan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan/kebutuhan sendiri namun memilih mewujudkan tujuan secara bersama. (Hartman et al., 2002).

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh kedua aktor (pemerintah daerah dan komunitas peduli lingkungan) belum berjalan selaras dan seimbang sehingga berdampak pada kolaborasi yang berlangsung belum dapat berjalan dengan ideal. Energi dan semangat yang tinggi hanya dimiliki oleh satu pihak, sedangkan pihak lainnya masih memilih insidental dalam mengerahkan energi dan perhatiannya. Kolaborasi yang terjadi antar kedua elemen yang ada belum menghasilkan *share motivation* dan penguatan kapasitas kelembagaan. Tukar pengetahuan dan sumberdaya belum terlihat secara efektif dilapangan, sehingga ke depan perlu dirumuskan kembali pola kolaborasi yang lebih ideal dan memberikan dampak signifikan bagi upaya-upaya menjaga kelestarian ekosistem pantai Clungup sebagai kawasan wisata edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Public Administration Research and Theory.
- Hartman, C., et al. 2002. Environmental collaboration: potential and limits. Int. de Bruijn & A. Tukker. Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Kwak, Young Hoon (et al), 2009. *Toward a Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for infrastructure Development*, California Management.
- Prasetya, Batubara. 2010. *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*. Desantara. Depok.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya